

REVITALISASI BUMDES DESA BRAMBANG: STRATEGI PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PARTISIPATIF

**Mohammad Ali Murtadho¹⁾, Gadis Suryasari²⁾, Ahmad Bilal Syahrul Istiqlal³⁾,
Darto⁴⁾, Saiful Hasan⁵⁾, Rafi Firman Nusa⁶⁾, Wardatul Mufidah⁷⁾, Winda
Nurlaily Rafikalia Iskandar⁸⁾, Abu Tazid⁹⁾, Erma Nursanti¹⁰⁾**

^{1,2,3,4)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum,

⁵⁾ Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Darul ‘Ulum,

⁶⁾ Fakultas Teknik Universitas Darul ‘Ulum

^{7,8,9,10)} Universitas Darul ‘Ulum

mohammadalimurtadho17@gmail.com

Abstract

Transforming the village economy through strengthening Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a strategic step in realizing village economic independence, in line with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This program aims to optimize BUMDes management through training and Focus Group Discussions (FGD) conducted in Brambambang Village, Jombang Regency. Through a participatory approach, this program involves various elements of village society, such as BUMDes managers, village government officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and community leaders. Intensive training covers legal and institutional aspects of BUMDes, basic financial management, and business development strategies. The FGDs carried out produced strategic solutions to overcome institutional, human resource, business development and BUMDes financial problems. The evaluation results showed an increase in participants' understanding of the training material, with the average score increasing from 45.5 to 78.3. Apart from that, the findings from the FGD identified three potential sectors for developing BUMDes, namely agribusiness, ecotourism, and creative industries based on household crafts. Not only that, this program also produced tiered action plans (short, medium and long term). With these results, it is hoped that this program can make a significant contribution in optimizing the potential of BUMDes and become a pilot model for other villages in Jombang Regency in an effort to create village economic independence.

Keywords: BUMDes, training, Focus Group Discussion, participatory, village economics.

Abstrak

Transformasi ekonomi desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMDes melalui pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Desa Brambang, Kabupaten Jombang. Melalui pendekatan partisipatif, program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, seperti pengelola BUMDes, aparatur pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Pelatihan intensif mencakup aspek hukum dan kelembagaan BUMDes, manajemen keuangan dasar, dan strategi pengembangan usaha. FGD yang dilakukan menghasilkan solusi strategis untuk mengatasi permasalahan kelembagaan, sumber daya manusia, pengembangan usaha, dan keuangan BUMDes. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan, dengan skor rata-rata meningkat dari 45,5 menjadi 78,3. Selain itu, temuan dari FGD mengidentifikasi tiga sektor potensial untuk pengembangan BUMDes, yaitu agribisnis, ekowisata, dan industri kreatif berbasis kerajinan rumah tangga, bukan hanya itu program ini juga menghasilkan rencana aksi berjenjang (jangka pendek, menengah, dan panjang). Dengan hasil tersebut, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan potensi BUMDes dan menjadi model

percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Jombang dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi desa.

Keywords: BUMDes, pelatihan, Focus Group Discussion, partisipatif, ekonomi desa.

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan manifestasi dari semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Keberadaan BUMDes tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan optimalisasi potensi sumber daya lokal (Anggraeni, 2016). Paradigma ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional (Bappenas, 2020).

Di Kabupaten Jombang, pengembangan BUMDes telah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2020-2024 (Pemerintah Kabupaten Jombang, 2020). Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa dari 302 desa yang ada, sebanyak 285 desa telah memiliki BUMDes. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 40% yang beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, 2022).

Desa Brambang, yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Jombang, memiliki potensi sumber daya lokal yang beragam dan prospektif untuk dikembangkan. Sektor pertanian yang mencakup area seluas 456 hektar, potensi UMKM, serta kerajinan rumah tangga yang telah berkembang secara tradisional merupakan modal dasar yang dapat dioptimalkan melalui pengelolaan BUMDes. Namun demikian, dalam dua tahun terakhir, BUMDes Desa Brambang mengalami kevakuman operasional yang signifikan, ditandai dengan terhentinya berbagai unit usaha yang sebelumnya telah dirintis (BPS Kabupaten Jombang, 2022).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan tim pengabdian mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang menyebabkan kondisi tersebut. Pertama, keterbatasan kapasitas pengelola dalam aspek manajerial dan teknis operasional (Hidayat et al., 2020). Sebagian besar pengelola BUMDes belum memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip pengelolaan usaha, termasuk aspek perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Kedua, lemahnya sistem tata kelola yang dicontohkan dari belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan pertanggungjawaban sistem yang terukur (Widiastuti et al., 2019). Ketiga, minimnya inovasi dalam pengembangan usaha yang menyebabkan BUMDes tidak mampu bersaing dengan entitas bisnis lainnya (Kurniasih & Wijaya, 2017).

Situasi ini diperparah dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes. Survei awal menunjukkan bahwa hanya 25% warga desa yang memahami peran dan fungsi BUMDes, sementara sisanya masih menganggap BUMDes sebagai program pemerintah semata tanpa memahami potensi manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Purnamasari et al., 2019). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan terbentuknya BUMDes dengan realitas implementasi di lapangan (Atmojo et al., 2017).

Berangkat dari kondisi tersebut, tim pengabdian masyarakat menginisiasi program pelatihan dan pendampingan yang komprehensif. Program ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 40 peserta yang merepresentasikan berbagai elemen strategi di tingkat desa, termasuk pengelola BUMDes, aparatur pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat (Zubaedi, 2017). Pemilihan pendekatan partisipatif ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan revitalisasi BUMDes membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (Mumtaz & Smith, 2019).

Untuk memperkuat substansi program, tim pengabdian menghadirkan dua narasumber ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman relevan. Pertama, tenaga ahli pendamping BUMDes Kabupaten Jombang yang memahami secara mendalam konteks dan dinamika pengembangan BUMDes di wilayah Jombang. Kedua, CEO BUMDes Kebun Dolanan yang telah berhasil mengembangkan model bisnis inovatif dan berkelanjutan (Suryanto, 2018). Kehadiran kedua narasumber ini diharapkan dapat memberikan

perspektif praktis dan inspirasi bagi upaya revitalisasi BUMDes Desa Brambang.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem yang mendukung ekosistem BUMDes. Melalui kombinasi metode pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD), program ini diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur dalam pengembangan BUMDes Desa Brambang (Prasetyo, 2016). Lebih jauh lagi, inisiatif ini juga dimaksudkan sebagai model percontohan yang dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Jombang dalam upaya optimalisasi pengelolaan BUMDes (Wijaya & Mahadewi, 2020).

METODE

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat untuk revitalisasi BUMDes Desa Brambang dirancang dengan pendekatan sistematis dan terukur. Program ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling terintegrasi, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Zubaedi, 2017). Setiap tahapan didesain dengan mempertimbangkan aspek permusuhan dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Tahap persiapan diawali analisis dengan situasi yang komprehensif untuk memahami kondisi BUMDes Desa Brambang yang ada. Tim pengabdian melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen relevan, termasuk laporan keuangan BUMDes, data potensi desa, dan regulasi terkait (Widiastuti et al., 2019). Proses ini dilengkapi dengan serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat desa,

pengelola BUMDes, hingga tokoh masyarakat.

Hasil analisis situasi kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta. Tim pengabdian berkolaborasi dengan narasumber ahli dalam mengembangkan modul pelatihan yang mencakup aspek teoritis dan praktis pengelolaan BUMDes (Suryanto, 2018). Materi disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh konkret dari praktik terbaik pengelolaan BUMDes. Pelaksanaan program terbagi dua menjadi kegiatan utama: pelatihan intensif dan Focus Group Discussion (FGD). Pelatihan dilaksanakan selama 8 jam, melibatkan 40 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Komposisi peserta diatur secara proporsional untuk memastikan keterwakilan semua pemangku kepentingan, dengan rincian 15 orang pengelola BUMDes, 10 orang aparatur pemerintah desa, 8 orang anggota BPD, dan 7 orang tokoh masyarakat (Purnamasari et al., 2019).

Materi pelatihan disampaikan secara bertahap, dimulai dari pemahaman dasar tentang BUMDes hingga aspek teknis pengelolaan. Sesi pertama terfokus pada penguatan pemahaman tentang aspek hukum dan kelembagaan BUMDes, termasuk regulasi terkini dan esensinya terhadap pengelolaan BUMDes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021). Sesi kedua membahas manajemen operasional dan keuangan, mencakup perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan sistem akuntansi sederhana (Hidayat et al., 2020). Pada hari kedua, dilanjutkan pelatihan dengan pembahasan strategi pengembangan usaha dan studi kasus keberhasilan BUMDes Kebun Dolanan.

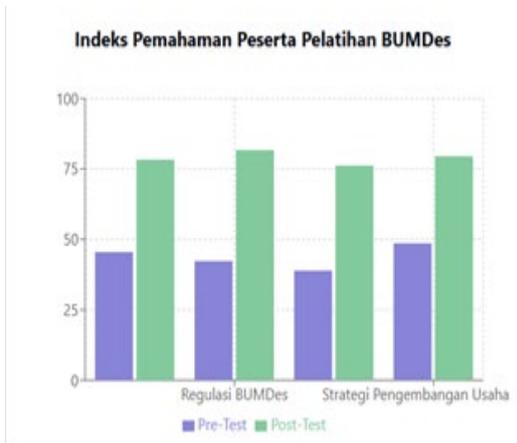
CEO BUMDes Kebun Dolanan berbagi pengalaman tentang bagaimana mengembangkan unit usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Sesi ini dilengkapi dengan diskusi interaktif yang memungkinkan peserta untuk belajar dari pengalaman praktis (Prasetyo, 2016).

Setelah sesi pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan FGD yang bagiannya menjadi empat kelompok kerja. Setiap kelompok difasilitasi oleh satu anggota tim yang mengabdikan dan diberikan panduan diskusi yang terstruktur. FGD bertujuan untuk mengidentifikasi secara detail permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Brambang dan merumuskan solusi yang aplikatif (Mumtaz & Smith, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari berhasil menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta (Gambar 1). Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan (Tabel 1), tercatat adanya peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 45,5 menjadi 78,3 (skala 100). Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diajarkan, terutama pada aspek pemahaman regulasi BUMDes, manajemen keuangan dasar, dan strategi pengembangan usaha. Hal ini sejalan dengan temuan Atmojo et al. (2017), yang menekankan pentingnya pelatihan berbasis keterampilan praktis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga memberikan pemahaman yang

aplikatif dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes di tingkat desa.



Gambar 1. Indeks pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan

Tabel 1. Data berdasarkan hasil pre-test dan post-test peserta pelatihan BUMDes di Desa Brambang, Kabupaten Jombang (Skala 0-100)

Aspek Pemahaman	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan	Peningkatan (%)
Rata-rata Keseluruhan	45.5	78.3	32.8	72.1%
Regulasi BUMDes	42.3	81.7	39.4	93.1%
Manajemen Keuangan Dasar	38.9	76.2	37.3	95.9%
Strategi Pengembangan Usaha	48.6	79.5	30.9	63.6%

Sesi pertama pelatihan yang membahas aspek hukum dan kelembagaan BUMDes berhasil memberikan fondasi pemahaman yang kuat kepada peserta. Diskusi intensif tentang Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021 dan peraturan terkait lainnya membantu peserta memahami kerangka hukum yang mendasari operasional BUMDes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021). Hal ini tercermin dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban BUMDes, serta memahami

batasan-batasan operasional yang perlu diperhatikan.

Pada sesi manajemen operasional dan keuangan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama ketika mempelajari teknik penyusunan laporan keuangan sederhana. Narasumber ahli dari pendamping BUMDes Kabupaten Jombang berhasil mendemonstrasikan metode pembukuan praktis yang dapat langsung diaplikasikan. Simulasi pengelolaan keuangan yang dilakukan membuat peserta lebih percaya diri dalam menangani aspek administratif BUMDes.

Puncak antusiasme peserta terlihat pada sesi sharing pengalaman dari CEO BUMDes Kebun Dolanan (Gambar 2). Presentasi tentang perjalanan membangun BUMDes dari awal hingga mencapai kesuksesan memberikan inspirasi konkret bagi peserta. Beberapa praktik terbaik yang dibagikan, seperti strategi pengembangan produk berbasis potensi lokal dan teknik pemasaran digital, mendapat respons positif dari peserta.



Gambar 2. Peserta antusias mendengarkan pemaparan pengalaman CEO BUMDes Kebun Dolanan dan berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi BUMDes Brambang.

Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan menghasilkan beberapa temuan penting terkait kondisi dan potensi pengembangan BUMDes Desa Brambang. Diskusi kelompok yang terbagi dalam empat tim berhasil

mengidentifikasi permasalahan utama dan merumuskan solusi strategis untuk pengembangan BUMDes.

Kelompok pertama yang fokus pada aspek kelembagaan menemukan bahwa struktur organisasi BUMDes perlu direorganisasi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Analisis terhadap dokumen organisasi menunjukkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab belum terdefinisi dengan jelas. Kelompok ini merekomendasikan penyusunan ulang struktur organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja masing-masing posisi.

Kelompok kedua yang menganalisis aspek sumber daya manusia mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi pada pengelola BUMDes. Dari 15 pengelola yang ada, hanya 4 orang yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman relevan dengan pengelolaan usaha. Rekomendasi yang diusulkan mencakup program peningkatan kapasitas berkelanjutan dan sistem rekrutmen berbasis kompetensi.

Temuan menarik muncul dari kelompok ketiga yang membahas potensi pengembangan usaha. Melalui pemetaan potensi desa, teridentifikasi tiga sektor potensial yang dapat dikembangkan: agribisnis berbasis hasil pertanian lokal, ekowisata memanfaatkan mata air desa, dan industri kreatif berbasis kerajinan rumah tangga. Analisis kelayakan awal menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki prospek pasar yang menjanjikan.

Kelompok keempat yang fokus pada aspek keuangan dan permodalan menghasilkan analisis mendalam tentang struktur permodalan BUMDes. Dari pembahasan terungkap bahwa BUMDes memiliki aset senilai Rp 150 juta yang belum dioptimalkan.

Kelompok ini mengusulkan strategi pengelolaan aset yang lebih produktif dan skema penggalangan modal alternatif melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Gambar 3).



Gambar 3. Peserta menyampaikan strategi pengelolaan aset yang lebih produktif dan skema penggalangan modal melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pelatihan dan FGD, tim pengabdian bersama peserta menyusun rencana aksi pengembangan BUMDes yang terbagi dalam tiga tahapan waktu. Rencana ini telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, prioritas pengembangan, dan potensi dampak yang dihasilkan.

Dalam jangka pendek (0-6 bulan), fokus pengembangan diarahkan pada pembenahan aspek kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola.

Program yang direncanakan mencakup penataan organisasi dan penyusunan SOP, pelatihan teknis pengelolaan keuangan dan administrasi, serta penyusunan rencana bisnis untuk unit usaha prioritas.

Tahapan menengah menengah (6-12 bulan) difokuskan pada pengembangan unit usaha dan penguatan jaringan. Kegiatan yang direncanakan meliputi pengembangan unit usaha agribisnis dengan fokus pada pengolahan hasil pertanian, inisiasi program ekowisata berbasis mata air desa, dan pembentukan kelompok usaha kerajinan rumah tangga.

Untuk jangka panjang (>12 bulan), rencana pengembangan diarahkan pada ekspansi dan modernisasi usaha, termasuk pengembangan platform digital untuk pemasaran produk, perluasan jaringan kerjasama dengan pihak eksternal, dan diversifikasi unit usaha berdasarkan analisis pasar.

Dengan adanya rencana aksi yang terstruktur dan komprehensif ini, BUMDes Desa Brambang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mencapai kemajuan signifikan dalam pengelolaan usaha. Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan mitra strategis, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan focus group Discussion (FGD) untuk Revitalisasi BUMDes Desa Brambang menunjukkan hasil yang signifikan. Program pelatihan selama dua hari telah berhasil meningkatkan kapasitas peserta,

ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata skor pemahaman dari 45,5 menjadi 78,3 (skala 100), terutama pada aspek regulasi BUMDes, manajemen keuangan dasar, dan strategi pengembangan usaha. Pendekatan partisipatif yang melibatkan 40 peserta dari berbagai elemen masyarakat telah membangun kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk optimalisasi pengelolaan BUMDes. Focus Group Discussion (FGD) berhasil mengidentifikasi permasalahan kunci BUMDes Desa Brambang dan merumuskan solusi strategi yang relevan dengan konteks lokal. Empat aspek utama yang dibahas kelembagaan, sumber daya manusia, pengembangan usaha, serta keuangan dan permodalan menghasilkan rekomendasi komprehensif untuk revitalisasi BUMDes. Melalui pemetaan potensi desa, teridentifikasi tiga sektor prospektif yang dapat dikembangkan: agribisnis berbasis hasil pertanian lokal, ekowisata memanfaatkan mata air desa, dan industri kreatif berbasis kerajinan rumah tangga, yang semuanya memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Penyusunan rencana aksi berjenjang (jangka pendek, menengah, dan panjang) telah memberikan peta jalan yang jelas bagi pengembangan BUMDes ke depan, memungkinkan optimalisasi sumber daya dan prioritasasi program sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan BUMDes. Keberadaan aset BUMDes senilai Rp 150 juta yang belum dioptimalkan menjadi potensi besar untuk pengembangan unit usaha melalui strategi pengelolaan aset yang lebih produktif dan skema penggalangan modal alternatif. Dengan adanya program ini, BUMDes Desa Brambang kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Jombang dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-167.
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 67-84.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. (2022). Kabupaten Jombang dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Jombang.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. (2022). Laporan Perkembangan BUMDes di Kabupaten Jombang. Pemkab Jombang.
- Hidayat, K., Putri, E. I. K., & Noer, M. (2020). Penguatan Kelembagaan BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2), 103-114.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kementerian Desa, PDTT.
- Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas. *Journal of Public Sector Innovations*, 1(2), 66-72.
- Mumtaz, M. Z., & Smith, Z. A. (2019). Examining the sustainability of rural development programs in developing countries: The case of Pakistan. *World Development Perspectives*, 14, 100-106.
- Pemerintah Kabupaten Jombang. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024. Pemkab Jombang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86-100.
- Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2019). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 1-21.

- Suryanto, R. (2018). Peta Jalan BUMDes Sukses. Syncore Indonesia.
- Widiastuti, H., Putra, A. P., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257-288.
- Wijaya, D. A., & Mahadewi, N. P. E. (2020). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(2), 85-98.
- Zubaedi. (2017). Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Kencana Prenada Media Group.